



TAHUN

2026

RANCANGAN AKHIR

RENJA

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU

"Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional"





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau Blok B Telp (0553) 21350
E-mail : diskominfo@malinau.go.id website www.malinau.go.id

M A L I N A U

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 800/012/SK/Diskominfo
TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan...

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sesuai ketentuan/peraturan perundang-perundangan.
- KETIGA** : Bila ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Malinau,



Francis, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680527 200112 1 002

Lampiran I
Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau
Nomor : 800/012/SK/Diskominfo
Tanggal : 20 Maret 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU

Jabatan dalam tim	Nama/Jabatan
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Ketua	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Anggota	: 1. Fungsi Bidang 1 Layanan Insfrastruktur TIK & E-Gov 2. Fungsi Bidang 2 Informasi & Komunikasi & Statistik 3. Fungsi Bidang 3 Keamanan dan Informasi 4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mn m,alinau,



Francis, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680527 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini atas dasar usulan program/kegiatan/Sub Kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Malinau, 11 Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau,


Francis, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680527 200112 1 002

DAFTAR ISI

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 7

2.1.A. Pengolahan Data dan Informasi 7

2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 39

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 45

Bab V PENUTUP 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Mengingat RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, maka RKPD 2026 ini merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJM Daerah, RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Kaltara, RPJMD Kabupaten Malinau, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Diskominfo sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2025 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
13. **Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
14. **Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun **2026** disusun dengan maksud agar tercipta sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Renja Dinas Komunikasi Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Sebagai acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai salah satu OPD yang terkait dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026.
4. Menjamin keselarasan dengan rancangan awal RPJMD

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Kerja Awal (Ranwal) Dinas Komunikasi dan Informatika agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik:

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Rencana Kerja, proses penyusunan Rencana Kerja, keterkaitan antara Rencana Kerja Awal dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja PD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek Kondisi pelayanan Perangkat Daerah, Organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah, Kondisi dan rencana tata ruang wilayah, Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Rancangan awal RKPD tahun rencana, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2027), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Tabel yang disajikan adalah **tabel T-C.29.** yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah Diskominfo.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah:

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format **Tabel T-C.30.**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Berisi uraian singkat mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
4. Menyajikan Tabel **T-C.31.**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Merupakan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat. terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang. Penyajian dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel yang disajikan berupa **Tabel T-C.32**.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan **Tabel T-C.33**.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P

Berisi uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pengolahan Data dan Informasi

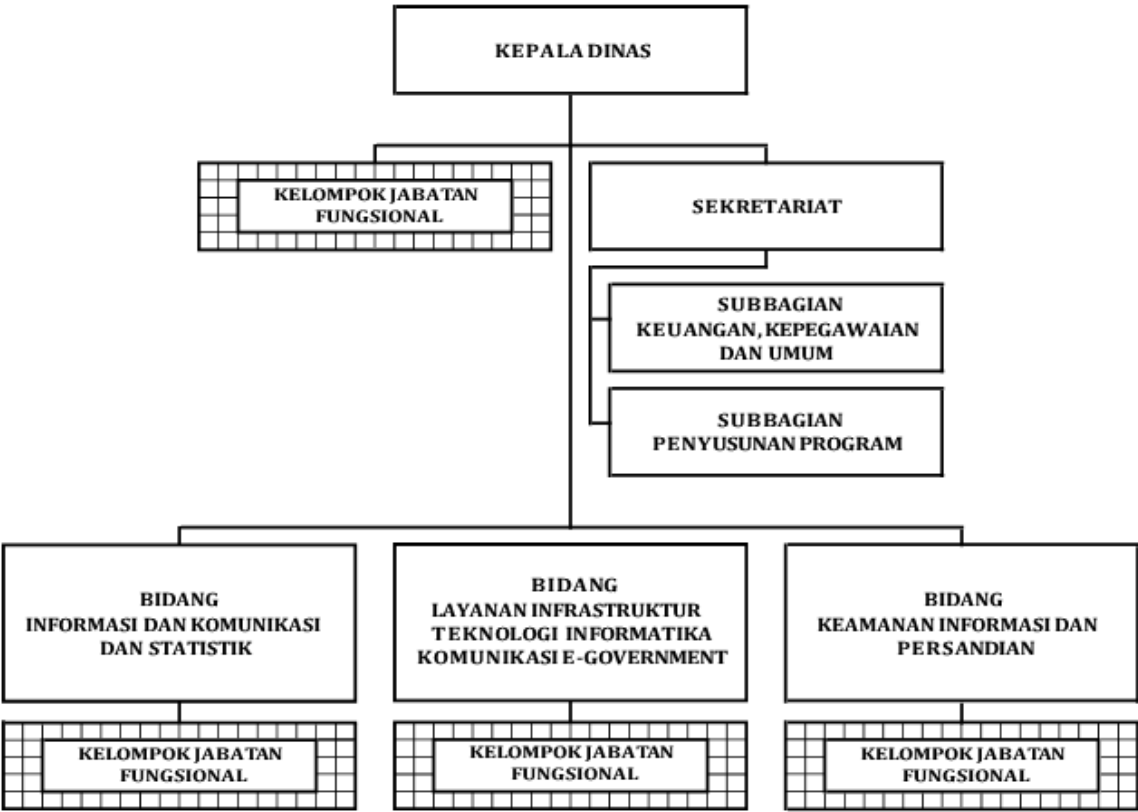
Sejak dibentuk pada tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten melakukan pelayanan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi dan statistik, bidang layanan infrastruktur teknologi informatika komunikasi e-government, bidang keamanan informasi dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.

Organisasi dan tatalaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Gambar. 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kondisi dan rencana tata ruang wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan struktur ruang system jaringan telekomunikasi terdiri atas :

1. Sistem jaringan kabel
2. Sistem jaringan nirkabel
3. Sistem jaringan satelit

Sistem jaringan kabel meliputi :

1. Stasiun Telepon Otomatis (STO) tersebar di Kecamatan Malinau Utara Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang
2. Rumah kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Malinau Utara Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang
3. Jaringan kabel skuner tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, kecamatan Mentarang
4. Satuan Sambungan Telepon (SST) tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang

Sistem jaringan nirkabel meliputi :

- A. Menara bersama telkomsel seluler (Base Transciever Stasiun /BTS) yang terdapat di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan.
- B. Rencana pembangunan menara bersama telekomunikasi seluler di setiap ibu kota kecamatan di perbatasan dan pedalaman yang meliputi Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Kayan Hulu.
- C. Pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil dan,
- D. Rencana pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi berupa micro digital dan serat optik dilaksanakan dalam rangka memperlancar arus telekomunikasi dan mendukung lancarnya kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Malinau

Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud di atas berupa Pusat pelayanan Telekomunikasi dan informasi (POSYANTIF) melalui Program Desa Berdering (RINGING VILLAGE) dan Desa pintar (SMART VILLAGE) yang terdapat di desa-desa di perbatasan dan pedalaman yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah termuat dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Pasal 5 tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Malinau, Pasal 12 tentang Sistem Jaringan Prasarana lainnya (Point b) mengenai Sistem Jaringan

Telekomunikasi, Pasal 14 tentang Sistem Jaringan Telekomunikasi yang terdiri dari Sistem Jaringan Kabel, Sistem Jaringan Nirkabel dan Sistem Jaringan Satelit.

Dalam mendukung kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tidak lepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun sarana yang dipergunakan saat ini kurang memadai dalam menunjang kinerja ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Adapun sarana yang digunakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau disajikan pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Aset Barang Inventaris Kantor s.d Tahun 2025

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
01	Kendaraan Roda-4 (R-4)	Toyota Avanza	1	Baik
02	Kendaraan Roda-2 (R-2)/ Sepeda Motor	Honda New Supra 125	1	Baik
03	Mesin Ketik Elektronik	Nakazima Ax-160	1	Baik
04	Lemari Besi	Datascrip	1	Baik
05	Filing Besi/Metal	Brother	2	Baik
06	Lemari Kayu	No Merk/Hand Made	1	Baik
07	Alat Penghancur Kertas	Scure New United	2	Baik
08	Mesin Absensi	Solution x100-c	1	Baik
09	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Box Terminal Strip dan MCB	2	Baik
10	Kursi Rapat	Hight Point	1 Set	Baik
11	Kursi Putar	Frontine	9 bh	Baik
12	Tikar/Karpet	Karpet Beludru 2x3		Baik
13	Meja Biro	Olimpic	55	Baik
14	Wireless	Linksys	3	Baik
15	Camera Video	Kamera CCTV	123	Baik
16	PC Unit	Acer	1	Baik
17	Laptop	Lenovo	7	Baik
18	CPU	CPU CORE 2 QUAD	1	Baik
19	Hard Disk	Expansion	2	Baik
20	Printer	Campuran	8	Baik
21	Monitor	Monitor LCD	4	Baik
22	Server	IBM	4	Baik
23	HUB	GIGABIT ETHERNET	1	Baik
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	Campuran	15 Set	Baik
25	Meja kerja pejabat Esselon II	Malvin	1 Set	Baik
26	UPS	Rackmount 3000	2	Baik

		VA		
27	Peralatan Studio Video dan Film	Campuran	4 Set	Baik
28	Camera Adaptor	Camera Power Suplai	8 Unit	Baik
30	Telephone Mobile	Xantrex	1 Unit	Baik
31	Faximile	Panasonic	1 Unit	Baik
32	Mikroskop dengan Camera	Mavic Pro	4 Unit	Baik
33	Tripot	Fotopro	1 Unit	Baik
34	Drone	Phantom	1 Unit	Baik

Sumber Pengurus Barang

Tabel 2.2.
Aset Tanah dan Tower Telekomunikasi s.d. Tahun 2025

No	Nama Tower	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	PEMDA-TSEL	2013	Desa Data Dian dan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 36 Meter
2	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
3	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
4	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
5	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Pujungan Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 52

				Telekomunikasi	Meter
6	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
7	PROV KALTIM-USO	2013	Desa Agung Baru Kecamatan Sungai Boh	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter
8	PEMDA-TSEL	2013	Desa Lung Berang Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
9	PEMDA	2013	Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter
10	PEMDA-USO	2013	Desa Setarap Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 72 Meter
11	PEMDA	2013	Desa Salap Kecamatan Malinau Utara	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter
12	PEMDA	2013	Desa Metut Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 72 Meter

Tabel 2.3.
Daftar Tower TELINFO TUNTAS USO S.D. Tahun 2025

No	Nama Tower	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Beta`o Kecamatan Kayan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
2	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
3	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
4	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Paking Kecamatan Mentarang	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
5	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Lung Pala Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter

Tabel 2.4.
Daftar Tower USO S.D. Tahun 2025

No	Nama Tower	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	USO	2016	Desa Punan Bengalun Kecamatan Malinau Barat	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter

2	USO	2016	Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
3	USO	2016	Desa Long Pada Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
4	USO	2016	Desa Long Mettun Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
5	USO	2016	Desa Sai Anai Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
6	USO	2016	Desa Long Payau Kecamatan Kayan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
7	USO	2016	Desa Lidung Payau Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
8	USO	2016	Desa Apau Ping Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
9	USO	2016	Desa Long Berini Kecamatan Bahau	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 32

			Hulu	Telekomunikasi	Meter
10	USO	2016	Desa Long Paliran Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
11	USO	2016	Desa Long Jelet Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
12	USO	2016	Desa Long Bena Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
13	USO	2016	Desa Long Belaka Pitau Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
14	USO	2016	Desa Long Aran Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
15	USO	2016	Desa Long Pua Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
16	USO	2016	Desa Long Ketaman Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
17	USO	2016	Desa Long Nawang (PAMTAS LONG	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik

			NAWANG) Kecamatan Kayan Hulu	Telekomunikasi	Tinggi 32 Meter
18	USO	2016	Desa Long Metun (PAMTAS LONG METUN) Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
19	USO	2017	Desa Long Kemuat Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
20	USO	2017	Desa Long Tebulo Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
21	USO	2017	Desa Long Uli Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
22	USO	2017	Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
23	USO	2017	Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
24	USO	2017	Desa Punan Gong Solok Kecamatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 32

			Malinau Selatan Hilir	Telekomunikasi	Meter
25	USO	2017	Desa Long Adiu Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
26	USO	2017	Desa Long Jalan Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
27	USO	2017	Desa Punan Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
28	USO	2017	Desa Metut Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
29	USO	2017	Desa Long Sulit Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
30	USO	2017	Desa Long Mekatif Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
31	USO	2017	Desa Long Kebinu Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32

					Meter
32	USO	2017	Desa Semamu Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
33	USO	2017	Desa Long Simau Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
34	USO	2017	Desa Long Uro Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
35	USO	2017	Desa Lebusan Kecamatan Sungai Boh	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
36	USO	2017	Desa Long Top Kecamatan Sungai Boh	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
37	USO	2017	Desa Long Titi Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
38	USO	2017	Desa Long Ranau Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
39	USO	2017	Desa Rian Tubu Kecamatan Sungai	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik

			Tubu	Telekomunikasi	Tinggi 32 Meter
40	USO	2017	Desa Long Nyau Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter

Tabel 2.5.
Daftar Tower dalam Pengelolaan Swasta S.D. Tahun 2025

No	Nama Tower	Keterangan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	INDOSAT	On air	Desa Pelita Kana`an Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
2	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Pelita Kana`an Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
3	TELKOMSEL	On air	Jln. Panembahan Rt-12 Seluwing Kec.Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
4	TELKOMSEL	On air	Jln. Panembahan Rt-14 Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
5	T-SEL & PRO XL	On air	Jl. Duyan Kec. Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
6	TELKOMSEL	On air	Jln. Belakang Kantor Bupati Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
7	TELKOMSEL	On air	Seluwing, Kec. Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

8	TELKOMSEL	On air	Puskesmas Malinau Kota Kec. Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
9	T-SEL & PRO XL	On air	Malinau Hilir Kec. Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
10	TELKOMSEL	On air	Jln. AMD RT-17 Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
11	TELKOMSEL	On air	Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
12	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
13	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
14	TELKOMSEL	On air	Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
15	INDOSAT	On air	Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
16	TELKOMSEL	On air	Desa Salap Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
17	TELKOMSEL	On air	Desa Malinau Seberang) Kec. Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
18	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
19	TELKOMSEL	On air	SPP Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
20	TELKOMSEL	On air	Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

21	INDOSAT	On air	Lapangan Borneo Kec. Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
22	TELKOMSEL	On air	Inhutani Lama Kec. Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
23	TELKOMSEL	On air	Desa Taras Kec. Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
24	TELKOMSEL	On air	Desa Tanjung Lapangang Kec. Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
25	TELKOMSEL	On air	Desa Kuala Kec.Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
26	INDOSAT	On air	Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
27	TELKOMSEL	On air	Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
28	TELKOMSEL	On air	Desa Sempayang Kec.Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
29	TELKOMSEL	On air	Desa Pulau Sapi Kec.Mentarang	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
30	TELKOMSEL	On air	Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
31	INDOSAT	On air	Desa Langap Kec'Malinau Selatan	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
32	TELKOMSEL	On air	Desa Mahak Baru Kec. Sungai Boh	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. penyebarluasan informasi publik, pengelolaan website dan media sosial, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. pengelolaan jaringan telekomunikasi, pusat data, serta sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
3. penyediaan layanan publik secara online, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.
4. pengelolaan keamanan informasi dan komunikasi, serta penyusunan kebijakan dan standar keamanan data.

Rancangan RKPD tahun 2026 dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 5 Program, 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan total perencanaan pendanaan sebesar Rp. 20.470.509.480,00. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut juga merupakan hasil daripada usulan masyarakat melalui kegiatan Musrembang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Usulan-usulan tersebut ada yang dapat kami laksanakan/penuhi dan ada juga yang tidak dapat kami penuhi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi ketersediaan dana ataupun SDM Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri.

2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 18,984,078,342.41 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Satu Sen) dengan capaian realisasi belanja sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.040.891.918 (empat Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan belas Rupiah) atau jika dipersentasekan capaian keuangan sebesar 21,29 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.948.186.424,41 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Sen).

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 13,431.261.130 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) dengan capaian realisasi belanja Rp. 11.920.377.022 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) atau jika dipersentasekan capaian keuangan sebesar 88,75 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.510.884.108 (Satu Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh empat Ribu Seratus Delapan Rupiah).

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
Pada tahun 2024 tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, semua program/kegiatan/Sub Kegiatan secara fisik dan keuangan terlaksana dengan sangat baik.
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada tahun 2024 semua program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja, dikarenakan semua kegiatan umumnya telah terencana dengan baik.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Untuk tahun 2024 semua kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Pada tahun 2024 Dinas Kominfo telah melaksana 3 Program 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Tahun 2024 semua program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Tabel yang disajikan adalah Tabel **2.6** sebagai berikut:

Tabel 2.6 (Tabel T-C.29.)
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Diskominfo Kab. Malinau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 %	29.07 %	100 %	21.3 %	21%	100 %	150 %	150%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	63.89 %	100 %	63.89 %	64%	100 %	228 %	228%
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan	64%	36 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan	67%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	3.333 %	100 %	0 %	0%	100 %	103 %	103%
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Unit	0 Unit	20 Unit	0 Unit	0%	20 Unit	20 Unit	95%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	17%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	14 Laporan	23%
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	20%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	100 %	20 %	100 %	0 %	0%	100 %	120 %	120%
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasi atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	2 Unit	40%

	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100	%	%	100	%	%	0%	100	%	100	%	100%		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100	%	%	100	%	%	0%	100	%	100	%	100%		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0%	4	Dokumen	6	Dokumen	30%
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	300%		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	300%		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan instra pemerintah daerah	10	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0%	2	Dokumen	2	Dokumen	20%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	300%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35	Dokumen	2	Dokumen	7	Dokumen	0	Dokumen	0%	7	Dokumen	9	Dokumen	26%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan peraturan menteri komunlksal dan informatika nomor : 22 Tahun 2010, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu indikator Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler, Persentase OPD yang tersedia akses internet, Persentase penyebaran informasi publik dan Persentase data statistik sektoral yang dikelola.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler.
Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah desa yang terlayani komunikasi dibagi dengan jumlah desa. Pada tahun 2024 jumlah desa Kabupaten Malinau yang telah terlayani komunikasi sebanyak 105 desa sedangkan jumlah desa sebanyak 109 desa, maka target tahun 2025 sebesar 97,25%, dan capaian kinerja indikator ini sebesar 97,25%.
2. Persentase OPD yang tersedia akses internet
Indikator ini menggambarkan persentase jumlah OPD yang tersedia akses internet dibagi dengan jumlah seluruh OPD. Pada tahun OPD yang tersedia akses internet di Kabupaten Malinau sebanyak 43 OPD sedangkan jumlah Seluruh OPD sebanyak 37 OPD, dengan target tahun 2025 sebesar 100%, dan capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.
3. Persentase penyebaran informasi publik
Indikator ini menggambarkan persentase jumlah desa yang yang terjangkau akses telekomunikasi seluler dibagi dengan jumlah seluruh desa. Pada tahun 2025 jumlah desa Kabupaten Malinau yang telah terlayani komunikasi sebanyak 105 desa sedangkan jumlah desa sebanyak 109 desa, maka target tahun 2025 sebesar 97,25%, dan capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

4. Persentase data statistik sektoral yang dikelola
- Indikator ini menggambarkan persentase jumlah data statistik yang dikelola dibagi dengan jumlah data yang disediakan. Pada tahun 2025 jumlah data yang dikelola sebanyak 942 data sedangkan jumlah data keseluruhan sebanyak 1.325, maka target tahun 2025 sebesar 100%, dan capaian kinerja indikator ini sebesar 83,25%.

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) dan proyeksi tahun 2026 dapat dilihat pada tabel **2.7** sebagai berikut:

Tabel 2.7
Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau

1 dari 9

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase desa yang terjangkau komunikasi seluler	100%		97.25	98.17	99.09	100	98.17	98.17	99.09	100	
1.1			Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.2			Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	78.18	78.18	78.18	78.18	78.18	78.18	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	
2.1			Persentase kegiatan (event), Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No, 5/2015	50	50	50	50	50	50	50	50	

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	10.91	12.73	14.55	16.36	10.91	12.73	14.55	16.36	
2.3			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	
2.4			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.5			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	
2.6			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
2.7			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.8			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	
2.9			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	
2.10			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	
2.11			Persentase data yang dapat berbagi pakai	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	
2.12			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung samrt city	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
2.14			Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait E-Government	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.2			Persentase komunitas konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.3			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100	

Satistik

8 dari 9

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1			Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.2			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.3			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.4			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.5			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.6			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.7			Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100	100	100	100	100	100	100	100	

Persandian

9 dari 9

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah			Aman	Aman	Aman	Aman	Tidak Aman	Tidak Aman	Aman	Aman	
1.1			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	90	90	90	90	0	0	75	90	
1.2			Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	4.76	4.76	4.76	4.76	0	0	3	4.76	
1.3			Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	0	4.76	4.76	0	0	3	4.76	
1.4			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100	100	100	100	0	0	75	100	

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan Umum yaitu:

1. Pengembangan jaringan telekomunikasi seluler di Kabupaten Malinau dalam rangka menuntaskan/menghilangkan area blank spot di Kabupaten Malinau yang mana pada tahun 2025 cakupan sudah mencapai 97,25%;
2. Penyediaan layanan internet untuk SKPD dan Publik Area;
3. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik berupa Website, Media Sosial dengan persentase 65,20%;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan data statistik sektoral untuk OPD dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang pada tahun 2025 baru bisa terealisasi sebesar 47,61%;
- 5.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau tahun 2025 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya:

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relative masih rendah dan perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam;
6. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi medan yang sulit dijangkau dengan transportasi biasa;
7. Masih adanya wilayah Tower Blank Spot di Kabupaten Malinau.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan

perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Malinau.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Kabupaten Malinau yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi eGovernment sebagai wujud pelayanan prima Kabupaten Malinau. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Malinau.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat kinerja layanan OPD, mempunyai dampak sebagai berikut:

1. Terhadap visi dan misi Kepada Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi kelima yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani” tujuan OPD yang telah ditetapkan adalah **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”** untuk mencapai tujuan dimaksud maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Kematangan dan Kesiapan Daerah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Terhadap capaian program nasional
Secara nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berakhir sampai tahun 2014, yang selanjutnya hanya ada 6 (Enam) SPM dan bidang Komunikasi dan Informatika tidak termasuk didalamnya. Indikator kinerja disusun sesuai dengan kondisi Kab/Kota Masing masing, sehingga tiap daerah berbeda. Tingkat capaian SPM melebihi 100%, hal ini terjadi karena jika standard nasional untuk KIM adalah 1 (Satu) kelompok tiap kecamatan, di Kabupaten Malinau sudah menerapkan 1 (Satu) kelompok per desa dan berbasis IT.
3. Terhadap capaian program Internasional
Dalam melaksanakan program MDGs, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemberdayaan masyarakat dan aparatur Pemerintah melalui pembinaan dan pemberdayaan SDM agar menguasai teknologi informasi. Untuk nasional maupun internasional belum ada prestasi yang bisa dibanggakan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana komunikasi dan informasi untuk penyebaran informasi;

2. Belum optimalnya jaringan informasi antar lembaga komunikasi baik komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi pemerintah dengan pemerintah daerah;
3. Masih adanya beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi;
4. Masih belum ada sinergitas pengelolaan data dan informasi antar elemen sehingga masih terdapat data dan informasi yang belum komplit, konkrit, benar, valid dan relevan serta real time;
5. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengelola IT;
6. Masih belum meratanya kepaahaman masyarakat dalam penggunaan dan memanfaatkan IT;
7. Konektifitas jaringan internet dan intranet SKPD belum optimal;
8. Belum keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government dan belum seluruh aplikasi yang ada terintegrasi;
9. Belum tersusunya tata kelola teknologi informasi secara lengkap.

Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan keterbukaan informasi publik baik pada lingkup masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah melalui berbagai media;
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan informasi antara lain komunitas blogger, komunitas RTIK, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT;
3. Adanya perguruan tinggi (Poltek Malinau dan SMK) yang mempunyai jurusan IT di Kabupaten Malinau;
4. Berkembangnya Kabupaten Malinau sebagai daerah wisata alam dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui: pengelolaan media center dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai publik relation diwilayahnya;
3. Melaksanakan Dialog Publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat;
4. Menyediakan mail PNS bagi pejabat struktural dan pemanfaatan Aplikasi Open Data Contract;
5. Pengelolaan website Pemkab Malinau dan semua SKPD;
6. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID;
7. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang;
8. Peningkatan kapasitas jaringan komputer SKPD dan Kecamatan;
9. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke semua SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan:

Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau telah melalui proses/tahapan yang telah dijadwalkan sehingga pelaksanaannya diharapkan akan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut melalui proses panjang dan dengan perhitungan yang tepat untuk menghindari kesalahan perencanaan/penganggaran sehingga program/kegiatan dimaksud akan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran serta tepat waktu.

- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

- 4. **Tabel 2.8 :**

TABEL 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20,620,517,608.20	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30,470,564,461.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19,358,926,156.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				28,427,019,261.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM terhadap Layanan Sekretariat Perangkat Daerah	80 Point	5,670,564,461.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM terhadap Layanan Sekretariat Perangkat Daerah	80 Point	3,882,688,504.00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	4,470,564,461.20	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	2,382,688,504.00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%	200,000,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%	500,000,000.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	950,000,000.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	950,000,000.00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	50,000,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	50,000,000.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik dan mengetahui kebijakan pemerintah	75%	1,440,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik dan mengetahui kebijakan pemerintah	75%	1,650,000,000.00	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan informasi publik	100%	1,440,000,000.00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan informasi publik	100%	1,650,000,000.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1. Persentase Wilayah Yang Memiliki Akses Digital dan Telekomunikasi 2. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan secara Online Dan Terintegrasi	80% 60%	12,248,361,695.00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1. Persentase Wilayah Yang Memiliki Akses Digital dan Telekomunikasi 2. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan secara Online Dan Terintegrasi	80% 60%	22,894,330,757.00	
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Internet	79%	12,248,361,695.00	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Internet	79%	22,894,330,757.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				690,564,462.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1,242,518,210.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2 Point	690,564,462.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2 Point	1,242,518,210.00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dikelola	62.80%	690,564,462.00	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dikelola	62.80%	1,242,518,210.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				571,026,990.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				801,026,990.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30 Point	571,026,990.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30 Point	801,026,990.00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase OPD yang memenuhi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian	44.19%	571,026,990.00	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase OPD yang memenuhi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian	44.19%	801,026,990.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui usulan-usulan yang di sampaikan melalui Musrembang Tingkat Desa dan Musrembang Tingkat Kecamatan. Pembahasan yang telah dilakukan dimaksud adalah untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Proses bagaimana usulan program/kegiatan Desa/Masyarakat tersebut diperoleh yaitu Usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan hasil Musrembang yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tahapan di mulai dari Musrembang tingkat Desa dan Musrembang Tingkat Kecamatan. Jadi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu bahwa Semua usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melaui tahapan MusrembangDes dan MusrembangCam yang mana sudah sesuai dengan isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2025.

Penelaahan usulan Program/Kegiatan dimaksud dapat kami sajikan pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Usulan Musrembang				
1	Pemasangan jaringan Internet Kantor Desa	Seruyung - Malinau Utara	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
2	Pengadaan Wifi Taman Baca Desa	Kuala Lapang - Mallinau Barat	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
3	Pemasangan	Mentarang	Jumlah Jaringan	20	Akan diakomodir

	Jaringan Wifi	Baru - Mentarang	Telekomunikasi yang disediakan	Tiang	sesuai kebutuhan dan ketersediaan
4	Penambahan Kapasitas Jaringan 4G Desa Paking	Paking - Mentarang	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indo sat
5	Pembangunan Tower	Pelancau - Malsel	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan dikonsultasikan dengan provider
6	Jaringan Perangkat Wifi Bakti Aksi	Desa Nunuk Tanah Kibang - Malsel	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan diajukan pada program BAKTI Kemenkominfo RI
7	Tower Telekomunikasi 4G	RT 06 Long Loreh - Malsel	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan		Akan di koordinasi dengan pihak provider
8	Jaringan Perangkat Wifi	Bila Bekayuk - Malsel	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
9	Jaringan Perangkat Wifi Bakti Aksi	Paya Seturan - Malsel	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan diajukan pada program BAKTI Kemenkominfo RI
10	Pengadaan Mesin Ginset Tower Setulang	Setulang _Masehi	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Diakomodir pada Kefiatan TA. 2024
11	Pembangunan Tower Telkomsel Di Dusun Bang Biau	RT 4 Lg. Barang - Mentarang Baru	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indo sat
12	Pembangunan Tower Telkomsel Di Dusun Nansarang	RT 3 Lg. Barang - Mentarang Baru	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indo sat
13	Pengadaan Jaringan Seluler	RT 5 Lg. Barang -	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	1 Unit	Akan di koordinasi

	Di Dusun Lung Bilang	Mentarang Baru	yang disediakan		dengan pihak Telkomsel/Indosat
14	Pengadaan Tower Telekomunikasi	RT III S. taket - Pujungan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 unit	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
15	Peningkatan Kapasitas Benwitch Jaringan Indosat	Long Kemuat - Bahau Hulu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
16	Pengadaan Mesin Disel dan Dinamo Untuk Tower	Desa Metulang - Kayan Selatan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Sudah terakomodir TA. 2024
17	Pengadaan Penguat Signal Tower Long Ampung + BBM	Long Ampung - Kayan Selatan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Tidak dapat diakomodir karena dapat menggunakan dana Desa
18	Pembangunan Stasiun Radio SSB Kantor Camat Kayan Selatan	Kantor Camat Kayan Selatan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
19	Pembangunan Stasiun Radio SSB Kelima Desa Se-Kecamatan Kayan Selatan	Kantor Camat Kayan Selatan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
20	Pembangunan Stasiun Alat Komunikasi Alternatif Radio Penghubung Antara Penduduk Rig di Lima Desa	Kantor Camat Kayan Selatan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
21	Penambahan Penguatan Jaringan 4 G	Desa Long Payau - Kayan Hulu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indo

					sat
22	Peningkatan Jaringan telkomsel 4G	Long Pipa - Kayan Hilir	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
23	Pembangunan Tower dan jaringan Telkomsel dan 4 G	Data Baru _ Sungai Boh	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Unit	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
24	Jaringan Wifi Desa	Long Titi - Sungai Tubu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
25	Penambahan Jaringan Telkom	Long Titi - Sungai Tubu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
26	Wifi Kantor Desa	L Ranau - Sungai Tubu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
27	Wifi Kantor Desa	L Nyau - Sungai Tubu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
28	Wifi Kantor Desa	Rian Tubu - Sungai Tubu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan diakomodir sesuai kebutuhan dan ketersediaan
29	Penambahan Banwit Internet	Long Pada - Sungai Tubu	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang disediakan	1 Paket	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional di bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 menunjukkan arah transformasi digital yang semakin terstruktur dan komprehensif. Sejumlah regulasi kunci telah diterbitkan, antara lain Permen Komdigi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik, Permen Komdigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Permen Komdigi Nomor 2 Tahun 2025 terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Layanan Pos Komersial dan pencegahan perang tarif. Selain itu, restrukturisasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas program.

Secara garis besar, kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pemerataan akses digital, memperkuat keamanan siber dan tata kelola pemerintahan digital, mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi, memodernisasi layanan pos dan logistik, serta meningkatkan literasi dan etika digital masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan teknologi dan informasi saat ini, tetapi juga mempersiapkan fondasi bagi ekosistem digital nasional yang berkelanjutan.

Keterkaitan kebijakan tersebut dengan Astacita 2045 sangat jelas. Pada Astacita 1 tentang masyarakat berakhlak mulia, regulasi SPBE dan ruang digital sehat membantu membangun budaya digital yang etis. Astacita 2 terkait kesejahteraan inklusif dan pemerataan pembangunan terwujud melalui perluasan akses internet hingga wilayah 3T. Sementara Astacita 7 diperkuat oleh pengamanan infrastruktur digital dan inovasi TIK untuk pemantauan maritim serta penguatan ketahanan nasional.

Dengan demikian, kebijakan Komunikasi dan Informatika 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari peta jalan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi digital yang diatur melalui kebijakan ini berfungsi sebagai pengungkit (enabler) untuk mencapai delapan cita pembangunan, sekaligus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi secara adil, aman, dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2025 – 2029 tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”

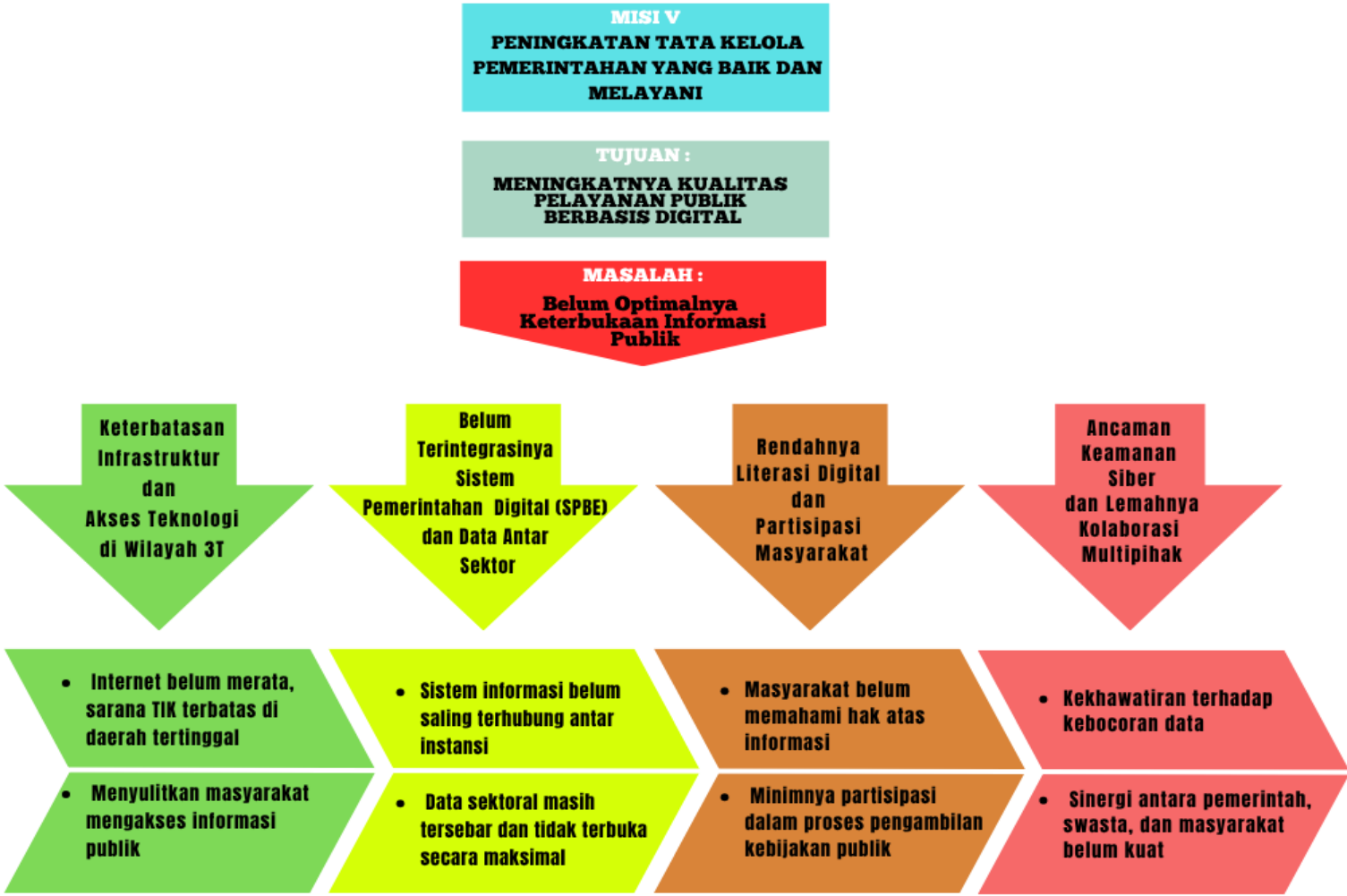
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau Tahun 2026

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KET
				2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(11)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Kualitas Kematangan dan Kesiapan Daerah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2.8	Program SAGET
			1. Tingkat kematangan implementasi kebijakan SPBE	2,8 (13%)	Program SAGET
			2. Tingkat kematangan penerapan tata kelola SPBE	2,8 (25%)	Program SAGET
			3. Tingkat kematangan penerapan manajemen SPBE	2,8 (16.5%)	Program SAGET
			4. Tingkat kematangan layanan SPBE	2,8 (45.5%)	Program SAGET
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Program SAGET

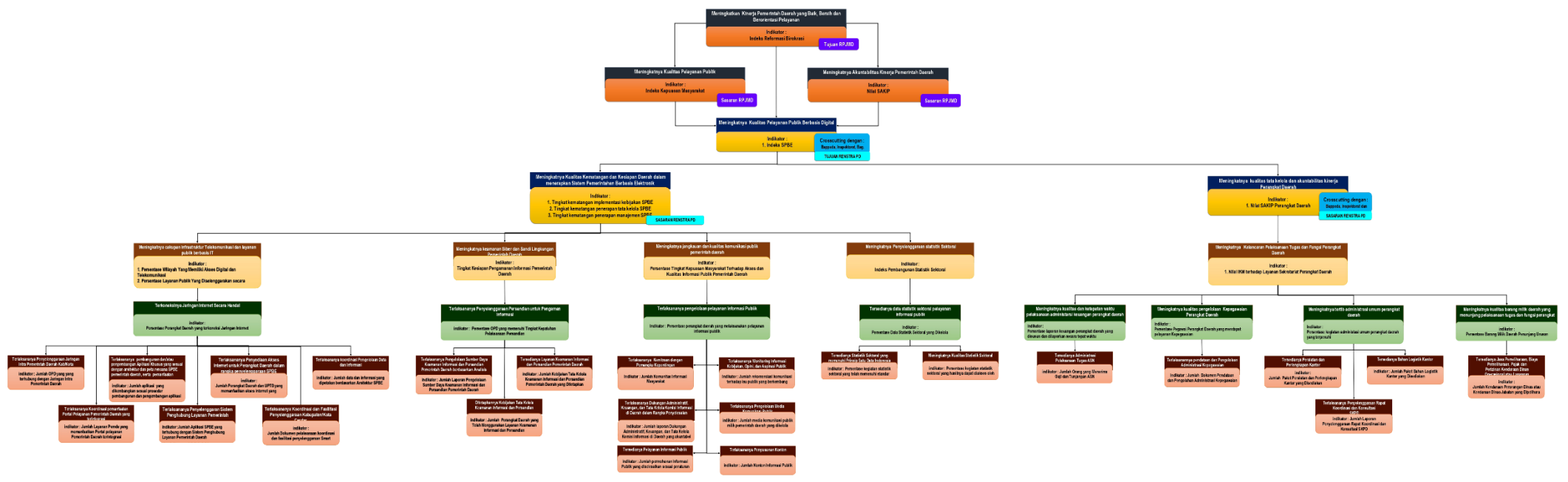
Dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika maka pada tahun 2026, maka rencana kerja Dinas Kominikasi dan informatika menetapkan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital sebagai ukuran keberhasilannya adalah Meningkatnya Kualitas Kematangan dan Kesiapan Daerah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan ukuran keberhasilannya dapat diukur dengan indikator :

1. Tingkat kematangan implementasi kebijakan SPBE target 2,8 poin,
2. Tingkat kematangan penerapan tata kelola SPBE target 2,8 poin,
3. Tingkat kematangan penerapan manajemen SPBE target 2,8 poin,
4. Tingkat kematangan layanan SPBEtarget 2,8 poin,
5. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan target 63 poin.

Gambar 3.2
POHON MASALAH DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 3.3
POHON KINERJA
DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA



3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

Pencapaian visi dan misi kepala daerah RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung Pemerintah yang Profesional” dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika pada urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian memiliki keterkaitan pada Misi ke 5 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani.

Dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan pondasi layanan dan sistem digitalisasi Pemerintah
 - a. Penyediaan infrastruktur TIK, jaringan komunikasi, dan penguatan PPID
 - b. Pemantapan regulasi dan kebijakan layanan informasi public
 - c. Penguatan kapasitas SDM internal dan eksternal dalam pengelolaan komunikasi publik dan sistem informasi
2. Peningkatan kapasitas dan tata kelola digital Pemerintah
 - a. Penguatan sistem tata kelola digital lintas sektor
 - b. Pengembangan dan integrasi aplikasi layanan public
 - c. Diseminasi informasi publik yang transparan dan akuntabel
3. Integrasi sistem dan layanan Pemerintah
 - a. Pemantapan Integrasi serta Literasi digital dan budaya informasi di Masyarakat
 - b. Inovasi layanan publik berbasis kearifan lokal dan inklusivitas
 - c. Pemanfaatan media komunikasi untuk memperkuat identitas budaya dan harmoni sosial
4. Jangkauan dan inovasi layanan Pemerintah
 - a. Digitalisasi layanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif
 - b. Perluasan Layanan & Inovasi Teknologi
5. Transformasi digital Pemerintah
 - a. Perwujudan Birokrasi Digital yang Adaptif, Berintegrasi dan Berbasis Kinerja dan Data
 - b. Monitoring dan evaluasi layanan publik digital berbasis data dan umpan balik masyarakat

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program/Kegiatan/Sub Kegiatan:
Pada tahun 2026 Diskominfo Kabupaten Malinau direncanakan akan melaksanakan 5 program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.
- Sifat Penyebaran lokasi program/kegiatan/sub kegiatan:
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2026 lebih banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Malinau, untuk luar wilayah Kabupaten Malinau hanya merupakan kegiatan seperti Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya spesifik.
Ada 2 Sub Kegiatan yang terfokus pada kawasan/kelompok masyarakat tertentu yaitu:

1. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat :
Kegiatan ini untuk meningkatkan akses informasi publik di tingkat desa/kelurahan melalui peran KIM sebagai perantara antara pemerintah dan Masyarakat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan penyebaran konten positif, edukatif, serta produktif, menguatkan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan media dan teknologi informasi secara bijak, memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah hingga wilayah terpencil melalui jejaring komunitas local dan memfasilitasi pertukaran informasi dua arah sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan ke pemerintah.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah:
Kegiatan ini berupa Pengadaan WIFI untuk Masyarakat di Arena Pelangi Intimung, Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi, Sewa bandwidth internet Kantor Bupati, Sewa bandwidth Transponder dan Internet Kecamatan, Sewa internet 3 Kantor Camat di wilayah FO, Pemeliharaan Perangkat Internet Kecamatan, Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi, Pengadaan CCTV Arena Pelangi Intimung, gadaan 1 Unit Genset Tower Telekomunikasi.

- Dari hasil Rencana Akhir disepakati kebutuhan dana/pagu indikatif untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 30.470.564.461,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan berdasarkan tabel 3.4 :

TABEL 3.4
Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026
Kabupaten Malinau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rncana 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20,470,509,487.40				31,470,564,472.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20,470,509,487.40				31,470,564,472.00
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19,208,920,987.40				28,307,019,272.00
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	5,670,564,467.40			-	4,132,688,515.00
	2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	4,470,564,460.40			-	2,382,688,504.00
	2.16.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Orang/bulan	4,470,564,460.40			32 Orang/bulan	2,382,688,504.00
	2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	-		-	200,000,000.00			-	500,000,000.00
	2.16.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	200,000,000.00			4 Dokumen	500,000,000.00
	2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	950,000,007.00			-	1,150,000,011.00
	2.16.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 0	250,000,000.00			0 0	250,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.16.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	250,000,000.00			1 Paket	300,000,000.00
	2.16.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	450,000,000.00			12 Laporan	600,000,000.00
	2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	50,000,000.00			-	100,000,000.00
	2.16.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000.00			1 Unit	100,000,000.00
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-		-	1,290,662,025.00			-	2,050,000,000.00
	2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Persentase Penyebaran Informasi Publik</i>		12 Dokumen 1 Dokumen 100 persen	1,290,662,025.00			12 Dokumen 1 Dokumen 100 persen	2,050,000,000.00
	2.16.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau,	41 Komunitas	100,000,000.00			43 Komunitas	300,000,000.00
	2.16.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	<i>Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	150,000,000.00			12 Laporan	250,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.16.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Permohonan	200,000,000.00			12 Permohonan	250,000,000.00
	2.16.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Rekomendasi	50,000,000.00			24 Rekomendasi	50,000,000.00
	2.16.02.2.01.0021	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Media	790,662,025.00			3 Media	700,000,000.00
	2.16.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420 Konten	0.00			420 Konten	500,000,000.00
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-		-	12,247,694,495.00			-	22,124,330,757.00
	2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12,247,694,495.00			-	22,124,330,757.00
	2.16.03.2.02.0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Perangkat Daerah	1,896,776,495.00			27 Perangkat Daerah	1,979,174,800.00
	2.16.03.2.02.0025	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Layanan	244,280,000.00			4 Layanan	244,280,000.00
	2.16.03.2.02.0032	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</i>	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Aplikasi	6,661,000,000.00			5 Aplikasi	15,487,875,957.00

1	2	3	4	10	8	9		11	12	9
	2.16.03.2.02.0034	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Aplikasi	99,333,000.00			1 Aplikasi	1,000,000,000.00
	2.16.03.2.02.0036	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Perangkat Daerah	2,313,000,000.00			53 Perangkat Daerah	2,313,000,000.00
	2.16.03.2.02.0038	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100,000,000.00			2 Dokumen	100,000,000.00
	2.16.03.2.02.0039	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	933,305,000.00			2 Dokumen	1,000,000,000.00
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				690,563,000.00				690,563,000.00
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-		-	690,563,000.00			-	1,250,000,000.00
	2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-		-	690,563,000.00			-	1,250,000,000.00
	2.20.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	524,770,000.00			75 %	750,000,000.00
	2.20.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 %	165,793,000.00			75 %	500,000,000.00
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				571,025,500.00				571,025,500.00
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-		-	571,025,500.00			-	1,913,545,200.00
	2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	571,025,500.00			-	1,913,545,200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.21.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	212,639,000.00			2 Laporan	352,639,000.00
	2.21.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Perangkat Daerah	276,378,500.00			43 Perangkat Daerah	1,478,898,200.00
	2.21.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	82,008,000.00			2 Dokumen	82,008,000.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, serta visi dan misi Kabupaten Malinau. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RKPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tahun 2026, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sejumlah Rp. 30.470.564.461,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBD.

Seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dengan output berupa dokumen, sehingga tidak ada target pemasukan untuk pendapatan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2026 merupakan urusan wajib yang tidak terkait langsung oleh pelayanan dasar yang terdiri dari 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 (empat) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 5 (lima) program 8 (Delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan APBD.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 (satu) program yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan terkait administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan peningkatan sarana dan prasarana.

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan terkait Komunikasi dan informatika ada 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah. Indikator program ini adalah Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah Daerah. Indikator program ini adalah Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan secara Online Dan Terintegrasi;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah. Indikator program ini adalah Indeks Pembangunan Statistik Sektoral;
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Indikator program ini adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

Seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2026 di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahunan yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2026. Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2045, RPJM Provinsi Kalimantan Utara, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan SKPD tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2026 ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN baik PNS maupun PTT di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Malinau pada umumnya.

Malinau, 11 Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau,



Francis, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680527 200112 1 002